

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

## Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kota Bandung

Tifani Adilla Suwandono <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : <sup>a</sup> tifaniadilla@gmail.com

### Abstrak

Stunting masih merupakan masalah nasional yang belum terselesaikan. Pemerintah menetapkan target penurunan stunting nasional menjadi 14% pada tahun 2024. Kota Bandung merupakan salah satu fokus program percepatan penurunan stunting selama tahun 2018-2020 dan 2021, sesuai dengan target RPJMN tahun 2020. Kota Bandung sendiri memiliki target menurunkan prevalensi stunting sebesar 19% pada tahun 2023. Hal ini mendorong Kota Bandung untuk aktif dalam Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Penelitian ini menganalisis implementasi upaya percepatan penurunan stunting di Kota Bandung dengan menggunakan Teori Soren C. Winter. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melibatkan observasi dan studi literatur. Rekomendasi diberikan kepada Pemerintah Kota Bandung, yang meliputi perhatian khusus pada kecamatan dan kelurahan yang menjadi prioritas penurunan stunting. Hal ini mencakup pemantauan anggaran, program, dan kegiatan terkait stunting, serta promosi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Secara ringkas, penelitian ini mengkaji upaya penanggulangan stunting di Kota Bandung, yang memiliki peran penting dalam kampanye nasional. Dengan fokus pada daerah-daerah prioritas, pemantauan ketat alokasi anggaran dan program-program stunting, serta promosi kerjasama antar pemangku kepentingan, Kota Bandung dapat bekerja menuju target penurunan prevalensi stunting sebesar 19% pada tahun 2023, serta ikut berkontribusi dalam pencapaian target nasional penurunan stunting.

**Kata Kunci:** konvergensi; kolaborasi; stunting; bandung.

## Implementation of Convergence to Accelerate Stunting Reduction in Bandung City

### Abstract

*Stunting continues to be a persistent national challenge without a comprehensive solution. The government has set a national target of reducing stunting to 14% by 2024. The city of Bandung has been a focal point for accelerated stunting intervention programs from 2018 to 2021, aligning with the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) for 2020. Bandung has aimed to decrease stunting prevalence by 19% by 2023, leading to active participation in the Integrated Stunting Reduction Convergence Action from 2020 to 2022. This study delves into the implementation of stunting reduction efforts in Bandung, employing Soren C. Winter's theoretical framework. The qualitative approach involves observations and a literature review. Recommendations for the Bandung government include giving particular attention to districts and neighborhoods identified as priority areas for stunting reduction. This entails rigorous monitoring of budgets, programs, and stunting-related activities, as well as fostering collaboration among stakeholders. In summary, this research scrutinizes Bandung's*

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

efforts to combat stunting, a city that plays a pivotal role in the national campaign. By focusing on priority areas, closely monitoring financial allocations and stunting programs, and promoting inter-stakeholder collaboration, Bandung can strive to achieve its target of reducing stunting prevalence by 19% by 2023, thereby contributing to the national goal of reducing stunting on a broader scale.

**Keywords:** convergence; collaboration; stunting; bandung.

## A. PENDAHULUAN

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan Panjang dan tinggi badannya dibawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, (Perpres, 2021). Studi *World Health Organization* (WHO) mengungkapkan nilai prevalensi stunting di Indonesia berada di atas standar 20%, dan menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan kasus stunting tertinggi di Asia Tenggara dengan prevalensi stunting sebesar 24.4% pada Tahun 2021. Angka riset kesehatan mengungkapkan adanya penurunan sebesar 6,4% dari angka 30,8% pada tahun 2018 (Kemenkes RI, 2018). Namun masih jauh dari nilai standar penetapan *World Health Organization* (WHO).

Program penurunan stunting dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) Tahun 2015-2019 dilanjutkan 2020-2024. Upaya mengejar keteringgalan tersebut Pemerintah mengharapkan angka penurunan prevalensi stunting sebesar 10,4% untuk mencapai target 14% pada tahun 2024. Sebuah tantangan tersendiri untuk Indonesia pada khususnya.

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan perluasan kabupaten/kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi di tahun 2021. Adanya penetapan ini mewajibkan Kabupaten/Kota melakukan upaya konvergensi yaitu melalui pendekatan intervensi secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mempercepat

penurunan stunting pada sasaran daerah prioritas melalui koordinasi lintas sektor.

Keputusan Bappenas No. KEP-42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting terintegrasi Tahun 2021 menetapkan Kota Bandung sebagai lokasi fokus intervensi program percepatan stunting periode Tahun 2018-2020 dan Tahun 2021 sesuai dengan target RPJMN Tahun 2020. Kota Bandung memiliki target penurunan prevalensi stunting sebesar 19% di Tahun 2023. Hal ini menjadi salah satu penyebab Kota Bandung turut dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020, 2021 hingga tahun 2022.



**Gambar 1.** Prevalensi Stunting

Kota Bandung menyumbang nilai stunting pada Hasil Survey Studi Kasus Gizi Indonesia dengan nilai 21.8% (2018) menjadi 26.4% (2021) meningkat 4.6% dalam tiga tahun.

**Tabel 1.** Jumlah Balita Stunting di Kota Bandung

Sasaran	2020	2021	2022
Jumlah balita sasaran	125.106	115.009	120.558

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Jumlah balita diukur tinggi/Panjang badan	107.189 (85.68%)	99.699 (86.69%)	102.847 (85.31%)
Jumlah balita stunting	9.567 (8.93%)	7.568 (7.59%)	6.614 (6.43%)

Saat ini jumlah balita stunting di Kota Bandung yang menjadi sasaran sebanyak 120.558 balita. Tiga tahun terakhir jumlah balita sasaran dan balita yang diintervensi mengalami penurunan sebesar 1.14% sebanyak 954 balita, dan sejumlah 17.711 balita belum terukur dan diketahui status gizinya. Hal ini mempengaruhi target capaian balita sasaran dan prevalensi stunting Kota Bandung.

Tidak hanya target sasaran balita stunting, Bappelitbang dalam pertemuan Analisis Situasi Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Kota Bandung menyebutkan hal-hal yang dapat mempengaruhi intervensi serta konvergensi percepatan penurunan stunting karena stigma stunting masih melekat di masyarakat bahwa stunting bukan prioritas kesehatan. Kualitas dan Kuantitas kader di kewilayahan yang kurang memadai serta Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Terpadu Posyandu yang kurang memadai dan tidak sesuai standar. Hal utama yaitu Kelurahan yang menjadi prioritas stunting belum dapat memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung proses percepatan penurunan stunting. Meskipun banyak dukungan dari akademisi, pihak swasta namun kolaborasi dan sinergi multisektoral belum fokus dalam program percepatan penurunan stunting. Hal ini merupakan permasalahan yang terjadi di Kota Bandung yang perlu diatasi. Sehingga konvergensi yang berjalan dari Tahun 2021-2022 dirasa kurang maksimal.

Penelitian terkait evaluasi pelaksanaan stunting di Kota Bandung saat ini masih belum ditemukan, namun terdapat penelitian terkait Strategi Penanganan Stunting di Kota Bandung yang

menunjukkan bahwa perlunya peningkatan pemahaman masyarakat akan penanganan stunting, perlunya percepatan intervensi gizi sensitive dan spesifik, perlunya pengembangan sistem manajemen data stunting terpadu, serta perlunya kolaborasi, partisipasi, koordinasi antar stakeholder internal dan eksternal di Pemerintah Kota Bandung, (Essa et al., 2021)

Sedang penelitian terkait aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Jawa Barat menyatakan bahwa pelaksanaan konvergensi dinilai masih rendah terlihat dari skor delapan aksi konvergensi stunting, namun memiliki kerangka kerja yang mengakomodasi tata kelola kolaboratif tetapi implementasinya tidak memenuhi kriteria keterlibatan penuh dan jauh dari harapan, (Afandi et al., 2022).

Berdasarkan fenomena tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisa Pelaksanaan Percepatan Penurunan stunting di Kota Bandung berdasarkan *Integrated Implementation Model* Soren, C Winter. Analisa penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi dan studi literatur.

## B. PEMBAHASAN

### Konsep *Integrated Implementation Model*

Konsep tersebut diungkapkan oleh Soren, C Winter dalam (Peters & Pierre, 2006) yang mendapat perhatian dari berbagai ahli tentang teori *Integrated Implementation Model* bahwa model integrasi menunjukkan bahwa kesuksesan implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi. Tiga variabel penentu kesuksesan implementasi menurut Winter, sebagai berikut:

#### a. Perilaku hubungan antar organisasi (komitmen dan koordinasi antar organisasi)

Komitmen antar organisasi merupakan sebuah bentuk kesepakatan bersama yang dilakukan oleh antar instansi/perangkat

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

daerah, antar organisasi, ataupun jaringan organisasi yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penurunan Stunting di Kota Bandung. Adanya komitmen dapat menyelaraskan langkah hingga mencapai kesuksesan/keberhasilan bersama.

Langkah awal sebagai dasar pelaksanaan penurunan stunting, dilaksanakan Analisa Situasi Stunting Kota Bandung. Hasil analisa menetapkan lokus Kelurahan prioritas percepatan penurunan stunting dimulai pada tahun 2020-2021, yang dianalisa dan dinilai dari indeks resiko variable kriteria bahaya (balita pendek dan sangat pendek), kriteria kerentanan (keterpaparan, sensitivitas, kapasitas adaptif). Hasil Analisa menetapkan 15 kelurahan sebagai lokus program. Bersamaan dengan terbitnya peraturan lokus stunting, maka Pemerintah Kota Bandung menerbitkan pula Keputusan Wali Kota Bandung No 050/Kep.952-Bappelitbang/2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting.

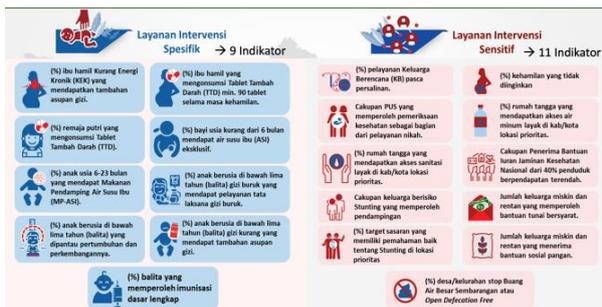
Tahun 2022 diperbaharui sesuai Keputusan Wali Kota No. 050/Kep. 750-Bappelitbang/2021 Tentang Perluasan Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kota Bandung Tahun 2022, dengan penetapan berdasarkan Analisa cakupan 20 indikator. Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan baru diterbitkan sesuai Keputusan Wali Kota No. 800/Kep-549-DPPKB/2022. Terdapat selisih/jeda yang cukup lama terkait turunan peraturan penetapan satuan tugas percepatan penurunan stunting.

Upaya koordinasi, yaitu menjalin Kerjasama antar instansi/perangkat daerah, antar organisasi, ataupun jaringan organisasi. Pelaksanaan pada tingkat Kota sudah tertata berdasarkan regulasi yang diterbitkan. Rembuk stunting sebagai bahan dasar analisis situasi dilaksanakan pada Tahun 2021 hingga 2023 dilakukan oleh Perangkat daerah tingkat atas, dengan turut mengundang Camat/Lurah/Seksi yang membidangi perihal Kesejahteraan Sosial/Pemberdayaan Masyarakat.

Hasil koordinasi yang dilakukan oleh Perangkat daerah, informasinya bersifat terbatas dan belum diteruskan kepada birokrasi tingkat bawah. Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022 merekrut 151 Penggerak Bangsa Kencana yang ditempatkan pada masing-masing Kecamatan/Kelurahan sebagai tenaga pelaksana lapangan untuk melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi pada kegiatan pembangunan ketahanan keluarga. Salah satu programnya yaitu sosialisasi pola hidup gizi seimbang dan kesehatan kepada Ibu Hamil/Remaja/Calon pengantin untuk antisipasi stunting baru.

Program penanganan stunting juga berpengaruh terhadap serapan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah. Peraturan terkait alokasi anggaran yang dikhususkan pada Program Prioritas ini dilaksanakan mulai Tahun 2022 dengan mengalokasikan/menyisihkan anggaran sebesar 5% pada setiap Perangkat Daerah, dan 10% bagi kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dari anggaran Program Inovasi Percepatan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) /Pemberdayaan Kelurahan.

Publikasi serta informasi terkait data stunting terpadu baru akan dilaksanakan pada Tahun 2023, digitalisasi tersebut ada dalam aplikasi E-PENTING (Elektronik Pencatatan Stunting) yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Kolaborasi dan sinergi multisektoral yang belum maksimal meraih kelompok sasaran.



Gambar 2. Cakupan indikator intervensi

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

**Tabel 2.** Lokus Kelurahan-Kecamatan Prioritas Percepatan penurunan stunting Tahun 2020-2022

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Anak Stunting	% Prevalensi	Indeks Kerentanan	Tahun Penetapan
Lengkong	Cikawao	64	17,83%	Sangat Tinggi	2020 dan 2021
Bandung Kidul	Kujangsari	88	15,38%	Sangat Tinggi	2022
Cibiru	Palasari	181	13,67%	Tinggi	2020 dan 2021
Bojongloa Kidul	Cibaduyut Kidul	98	12,20%	Tinggi	2020 dan 2021
Astana Anyar	Karasak	69	11,41%	Tinggi	2020 dan 2021
Cibiru	Cipadung	126	11,32%	Tinggi	2020 dan 2021
Ujung Berung	Pasirjati	119	10,93%	Tinggi	2020 dan 2021
Kiaoracondong	Cicaheum	96	10,80%	Tinggi	2022
Cinambo	Babakan Penghulu	46	10,65%	Tinggi	2020 dan 2021
Batununggal	Kebon Wanu	56	10,33%	Tinggi	2022
Babakan Ciparay	Magasuka	69	9,43%	Tinggi	2020 dan 2021
Andir	Kebon Jeruk	29	8,63%	Tinggi	2022
Coblong	Cipaganti	14	8,09%	Sedang	2022
Antapani	Antapani Tengah	85	7,54%	Sedang	2022
Andir	Cimoyom	77	7,37%	Sedang	2022
Lengkong	Burangrang	29	7,25%	Sedang	2020 dan 2021
Batununggal	Kebon Gedang	51	6,94%	Sedang	2020 dan 2021
Bojongloa Kaler	Jamika	40	6,80%	Sedang	2020 dan 2021
Bandung Kulon	Wanung Muncang	52	6,34%	Sedang	2022
Bandung Kulon	Caringin	57	5,75%	Sedang	2022
Cibeunying Kidul	Sukamaju	51	5,65%	Sedang	2022
Regol	Cigereleng	8	5,48%	Sedang	2022
Babakan Ciparay	Cirangrang	33	5,25%	Sedang	2020 dan 2021
Bojongloa Kaler	Babakan Asih	42	4,64%	Sedang	2020 dan 2021
Panyileukan	Cipadung Wetan	15	3,88%	Sedang	2020 dan 2021
Bojongloa Kidul	Situsaeur	31	3,60%	Sedang	2022
Cibeunying Kidul	Cicadas	23	3,47%	Sedang	2022
Bojongloa Kidul	Kebon Lega	30	2,59%	Sedang	2022
Sukajadi	Sukawarna	15	2,46%	Sedang	2020 dan 2021
Cibeunying Kaler	Cigadung	12	1,80%	Rendah	2022

## b. Perilaku birokrasi/implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah.

Dimensi perilaku birokrasi/implementor tingkat bawah adalah Kontrol Organisasi. Birokrasi tingkat bawah dapat diklasifikasikan yaitu Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas serta Organisasi dibawahnya yaitu Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/Kelurahan termasuk Perangkat RT/RW dan Posyandu. Perangkat tersebut memiliki peran yang strategis dalam proses pelaksanaan penurunan stunting dikarenakan dekat dengan kelompok sasaran.

Pada pelaksanaan penurunan stunting di tingkat Kecamatan terutama Kelurahan belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan

rembuk stunting secara mandiri. Contohnya, Rembuk Stunting Tingkat Kelurahan. Kegiatan rembuk yang dilaksanakan rutin awal tahun hanya berfokus pada Pembangunan Infrastruktur dan Sumberdaya belum pada pembangunan kesehatan.

Produk turunan hukum terkait Satuan Tugas Percepatan Stunting Seluruh Kecamatan diterima pada Tahun 2022, dan Kelurahan membentuk Satuan Tugas di Tahun yang sama. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan satuan tugas tersebut belum mendapat arahan, pendampingan serta pengawasan. Termasuk dengan penunjukan Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang merupakan kader terpilih untuk berperan serta dalam pembangunan manusia terutama monitoring serta fasilitasi konvergensi penanganan stunting.

Posyandu sebagai Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pencatatan dan pengukuran belum seragam/sesuai standar dan beresiko pada angka balita stunting. Kuantitas birokrasi tingkat bawah sebagai ujung tombak yang berkomunikasi dengan kelompok sasaran, belum seimbang dan kurang mendapatkan arahan/bimbingan terkait teknis pelaksanaan program.

Inovasi terkait stunting, data dari Website Bappelitbang Kota Bandung dari 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan di Kota Bandung baru terdapat 16 Inovasi dari 10 Kelurahan, 3 Kecamatan dan 1 Dinas. Data lengkap pelaksanaan program inovasi, serta ukuran keberhasilan inovasi stunting belum dipublikasikan.

Alokasi anggaran dan program khusus percepatan penurunan stunting kurang mendapat arahan, pendampingan dan pengawasan dari Perangkat Daerah tingkat atas dan Kecamatan. Mayoritas anggaran PIPPK diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan kelembagaan. Sehingga berpengaruh terhadap realisasi/capaian penurunan stunting.

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

## c. Perilaku kelompok sasaran

Pada perilaku kelompok sasaran, ditandai dengan respon positif dan respon negative masyarakat dalam mendukung suatu kebijakan yang disertai dengan adanya umpan balik berupa tanggapan/feedback atas kebijakan yang dibuat. Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh atau dampak kepada kebijakan namun juga mempengaruhi kinerja implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah.

Kondisi saat ini, target/sasaran kelompok prioritas penurunan stunting Keluarga 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) yaitu balita 0-59 Bulan, Ibu Hamil, Remaja. Menurut hasil penelitian, menunjukkan bahwa faktor resiko kejadian stunting adalah pengetahuan Ibu, karakteristik pola asuh, keadaan social ekonomi, asi eksklusif dan sanitasi dasar, hal tersebut terdapat dalam 20 cakupan intervensi spesifik dan intervensi sensitive, (Sutriyawan & Nadhira, 2020; Utami et al., 2022). Masyarakat menganggap stigma stunting bukan sebagai prioritas kesehatan, sehingga partisipasi dalam kegiatan sosialisasi program penurunan stunting kurang. Tingkatan sosial ekonomi masyarakat yang beragam dan memiliki keterbatasan, sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti program pemerintah.

## C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Hasil pembahasan mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan program penurunan stunting di Kota Bandung. Hambatan-hambatan tersebut meliputi kurangnya pengawasan dan bimbingan dari perangkat daerah tingkat atas terhadap pelaksanaan program di tingkat bawah, kurangnya kolaborasi dan sinergi antar sektor yang masih dilakukan secara terpisah, kualitas dan kuantitas pelaksana program yang perlu ditingkatkan, serta sarana dan prasarana Posyandu yang belum memadai.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, sejumlah rekomendasi diajukan. Pertama,

perangkat daerah tingkat atas perlu memberikan perhatian khusus pada wilayah-wilayah yang menjadi fokus penurunan stunting, sehingga program dapat berjalan dengan lebih efektif. Kecamatan dan Kelurahan perlu mampu melaksanakan Rembuk Stunting secara mandiri untuk mengumpulkan data yang akurat. Kedua, diperlukan kebijakan Wali Kota terkait program CSR dalam penurunan stunting untuk meningkatkan kolaborasi dengan pihak swasta dan stakeholder eksternal. Ketiga, perlu peningkatan kapasitas para kader yang terlibat dalam program penurunan stunting. Kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Puskesmas, akademisi, dan penggiat inovasi perlu ditingkatkan. Keempat, perangkat daerah tingkat atas harus rutin memonitor alokasi anggaran dan realisasi program secara berkala. Terakhir, partisipasi aktif masyarakat perlu digalakkan melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok sasaran stunting.

## REFERENSI

- Afandi, M., Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2022). *A Penta-Helix Approach to Collaborative Governance of Stunting Intervention In West Java Indonesia*.  
<https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315238>
- Afandi, M.N., Anomsari, E.T., Novira, A. (2021). A Conceptual Model of Localizing the SDGs: Lesson Learned from the Local Development Plan and Practice in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11 (8).
- Anomsari, E.A., Abubakar, R.R.T. (2019). Program Pembangunan Partisipatif dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Natapraja:Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 7 (1), 121 - 138.

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

- <https://doi.org/10.21831/jnp.v7i1.22157>
- Anomsari, E.T.; Mursalim, S.W. Mainstreaming Disability: Challenges and Strategies Toward Equality and Decent Work in Indonesia. *Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10 (1), p. 1-9, <http://dx.doi.org/10.31940/soshum.v10i1.1444>
- Dawud, J., Mursalim, S. W., Anomsari, E. T., & Taufik, N. I. (2019). Strategi perwujudan Kota Bandung sebagai kota ramah penyandang disabilitas: Sebuah perspektif aksesibilitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(2), 141-159. <https://doi.org/10.33509/jan.v25i2.543>
- Essa, W. Y., Nurfindarti, E., & Ruhyana, N. F. (2021). Strategies for Handling Stunting in Bandung City. *Jurnal Bina Praja*, 13, 15-28. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.15-28>
- Kemenkes RI. (2018). Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan: Situasi Balita Pendek di Indonesia. *Kementerian Kesehatan RI*, 20.
- Perpres. (2021). Presidential Decree of Republic Indonesia No 72/2021 about Accelerating Stunting Reduction. *Indonesian Government*, 1, 23.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2006). Handbook of public policy. *Handbook of Public Policy*, 1-512. <https://doi.org/10.4135/9781848608054>
- Pradesa, H. A., Zulvia, P., & Syawali, A. Z. S. (2022). Policy Advocacy for Strengthening Village Governance in Developing Tourism Destination in Wangunharja Village. *Empowerment Society*, 5(1), 33-40. <https://doi.org/10.30741/eps.v5i1.840>
- Ramdani, E.M., Maasir, L., Artisa, R.A. (2020). Strategi Community Engagement Dalam Program Gema Madani Simpati (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif) di Kota Tasikmalaya. *Moderat : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 6 (4), 728-743
- Ramdani, E.M. (2019). Analisis Keberlanjutan Inovasi Lokal: Studi Kasus Inovasi e-Health Cimalaka Sehat. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 22 (2), 163-182. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v22i2.159>
- Sutriyawan, A., & Nadhira, C. C. (2020). Kejadian Stunting Pada Balita Di Upt Puskesmas Citarip Kota Bandung. *Jurnal Kesmas (Kesehatan Masyarakat) Khatulistiwa*, 7(2), 79. <https://doi.org/10.29406/jkkm.v7i2.2072>
- Utami, D. S., Rusmita, E., & Adji, D. R. (2022). Karakteristik Keluarga dan Karakteristik Pola Asuh Orang Tua dengan Balita Stunting Usia 23-59 Bulan Di Kelurahan Ciumbuleuit Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah JKA (Jurnal Kesehatan Aeromedika)*, 8(1), 52-62. <https://doi.org/10.58550/jka.v8i1.144>